



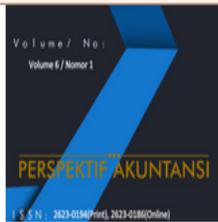
PERSPEKTIF AKUNTANSI

V o l u m e / N o :

Volume 6 / Nomor 1

PERSPEKTIF AKUNTANSI

I S S N : 2623-0194(Print), 2623-0186(Online)



Articles

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tingkat Real Earnings Management di Indonesia

Feby Astrid Kesaulya, Weny Putri, Khairunnisa Khairunnisa

1-14

10.24246/persi.v6i1.p1-14

Abstract view : 0 times PDF (Bahasa Indonesia) view : 0 times

PDF (Bahasa Indonesia)

The Village Financial Management Through Accountability, Transparency And Community Participation

Baihaqi Baihaqi, Dri Asmawanti-S, Muhammad Redho Putradana

15-36

10.24246/persi.v6i1.p15-36

Abstract view : 0 times PDF (Bahasa Indonesia) view : 0 times

PDF (Bahasa Indonesia)

Penghindaran Pajak, Karakteristik Dewan Komisaris dan Cost Stickiness

Mitha Dwi Restuti

37-55

10.24246/persi.v6i1.p37-55

Abstract view : 0 times PDF (Bahasa Indonesia) view : 0 times

PDF (Bahasa Indonesia)

Make a Submission

Article Template



Tools



Language

English

Bahasa Indonesia

Information

For Readers

For Authors

For Librarians



Perspektif Akuntansi
Volume 6 Nomor 1 (Februari 2023), hal. 001-014
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: <https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p1-14>
<http://ejournal.uksw.edu/persi>

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tingkat *Real Earnings Management* di Indonesia

Feby Astrid Kesaulya ¹
Universitas Katolik Musi Charitas
Weny Putri
Universitas Katolik Musi Charitas
Khairunnisa
Universitas Katolik Musi Charitas

Received
11/07/2022

Revised
27/09/2022

Accepted
20/10/2022

Abstract. *The objective of this research was to prove that there is a correlation between political connections with real earnings management. Previous research had shown the result that political connections positively affected earnings management level, but some others found different results. Political connections in this research were measured by the sum of board of director and board of commissioner who are or were heads of state or former heads of state, leaders/members of parliament, military, ministry officials, other government institutions, regional government leaders, or have close (family) or friendly relations with politicians or parties. This research was conducted in Indonesia using publicly listed manufacturing companies. A total sample in this research is 297 firm years. The results of this research showed that both politically connected board of directors and politically connected board of commissioners have no effect toward real earnings management practices. It can be resulted from the insignificant number of politically connected board of directors and politically connected board of commissioners in the sampel. So that the political connection could not be the predictor of real earnings management in this research.*

Keywords: *Politically Connected Board of Director, Politically Connected Board of Commissioner, Real Earnings Management.*

¹ feby@ukmc.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh koneksi politik terhadap manajemen laba riil (*real earnings management*). Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa koneksi politik dianggap mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat manajemen laba, namun beberapa penelitian lain menyatakan hal yang sebaliknya. Koneksi politik diukur dengan jumlah dewan direksi dan dewan komisaris yang pada saat dilaporkan juga bertugas sebagai kepala negara atau mantan kepala negara, pimpinan/anggota parlemen, militer, pejabat kementerian, lembaga pemerintahan lainnya, pimpinan pemerintah daerah, atau memiliki keterkaitan dekat (keluarga) maupun hubungan sahabat dengan politisi atau partai. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sampel penelitian ini berjumlah 297 *firm years*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi terkoneksi politik dan dewan komisaris terkoneksi politik tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil. Hasil ini bisa didapat karena jumlah dari dewan direksi dan dewan komisaris yang belum signifikan dalam sampel sehingga belum dapat menjadi prediktor dari praktik manajemen laba.

Kata kunci: Dewan Komisaris Terkoneksi Politik, Dewan Direksi Terkoneksi Politik, Manajemen Laba Riil.

Pendahuluan

Koneksi politik merupakan hal yang dapat memberikan beberapa keuntungan bagi dunia bisnis. Perusahaan yang terkoneksi politik merupakan perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah maupun politisi. Politik dapat memberikan manfaat bagi perusahaan terkait dengan kebijakan publik yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi dunia bisnis, sementara dunia bisnis dapat menunjang kegiatan politik di suatu negara (Sari, 2019). Perusahaan dengan koneksi politik memperoleh beberapa manfaat, seperti mendapat fasilitas perolehan sumber daya penting dan dukungan pemerintah (Krisnawati et al., 2021).

Penelitian kali ini akan membahas pengaruh koneksi politik terhadap tingkat manajemen laba pada perusahaan publik di Indonesia. Beberapa penelitian empiris menemukan bahwa koneksi politik memiliki konsekuensi yang tidak terlalu baik bagi perusahaan dari segi kinerja pasar modalnya jika koneksi politik tersebut berasal dari kepemilikan pemerintah, tetapi jika perusahaan tersebut memiliki koneksi politik dalam bentuk yang lain, maka konsekuensinya lebih menguntungkan (Supatmi dan Handayani, 2022; Tee, 2018). Kepemilikan pemerintah memberikan keuntungan pada situasi-situasi sulit, misalnya perusahaan milik negara dapat memiliki *implicit bailouts guarantee* (Preuss dan Königsgruber, 2021). Namun perusahaan yang memiliki koneksi politik juga dapat memberikan manfaat positif lain menurut perspektif teori ketergantungan sumber daya (Supatmi dan Handayani, 2022). Manfaat-manfaat yang didapatkan antara lain hak monopoli,

berbagai perjanjian yang menguntungkan, bantuan dari pemerintah, bahkan perlindungan politik (Tee, 2018).

Akan tetapi, perusahaan terkoneksi politik cenderung menjadi subjek yang lebih diperhatikan oleh publik dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi, sehingga perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik akan menghadapi *media scrutiny* yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan (Preuss dan Königsgruber, 2021). Dari sisi teori agensi dan beberapa temuan penelitian sebelumnya meyakini bahwa koneksi politik juga dapat meningkatkan manajemen laba. Wahab et al. (2020) menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif koneksi politik yang diukur juga dengan keterkaitan *networking* direktur dengan politik terhadap kualitas laba. Ding et al. (2018) meneliti perusahaan privat di China dan membuktikan jika perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kecenderungan untuk memanipulasi laba melalui aktivitas riil dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan lebih memberikan perhatian pada reputasi perusahaan untuk menjaga *privileges* dari koneksi politik yang sudah ada sebelumnya sehingga memungkinkan terjadinya manajemen laba yang lebih intens (Savitri, 2021). Perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi juga dapat meningkatkan intensitas manajemen laba perusahaan (Rahmaningtyas et al., 2021).

Namun, beberapa penelitian lainnya juga menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif atau tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat manajemen laba, baik akrual ataupun riil. Seperti pada penelitian yang dilakukan Attia et al. (2016), penelitiannya menguji perusahaan-perusahaan di Tunisia menunjukkan hasil bahwa eksekutif perusahaan yang mempunyai koneksi politik tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan manajemen laba. Dari penelitian sebelum-sebelumnya yang menemukan bahwa perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik dan diatur oleh negara menggunakan aturan akuntansi agar dapat mengurangi laba atau keuntungannya ketika terdapat biaya politik yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Nugrahanti (2016) juga menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba, penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan-perusahaan sektor manufaktur di Indonesia.

Penelitian kali ini juga akan menggunakan sektor manufaktur di Indonesia sebagai sampel. Proksi manajemen laba yang digunakan adalah manajemen laba riil (*real earnings management*) sesuai dengan konteks pada penelitian sebelumnya bahwa terdapat kecenderungan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba riil saat perusahaan memiliki koneksi politik. Proksi koneksi politik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jumlah dewan komisaris dan dewan direksi yang terkoneksi politik seperti pada penelitian Supatmi dan Handayani (2022). Pengukuran ini digunakan untuk memberikan fokus pada dewan direksi selaku pengelola dan dewan komisaris selaku pengawas perusahaan, pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan besarnya pengaruh koneksi politik yang dimiliki perusahaan, bukan sekedar melihat ada atau tidaknya koneksi politik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan direksi yang terkoneksi politik dan dewan komisaris terkoneksi politik terhadap manajemen laba riil. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa penambahan bukti empiris pengaruh koneksi politik, sebagai sebuah bentuk sistem tata kelola suatu perusahaan, terhadap praktik manajemen laba riil. Selain itu, bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan susunan anggota dewan komisaris ataupun dewan direksi serta susunan anggota lain dalam sistem tata kelola perusahaan untuk menghindari risiko terjadinya manajemen laba yang merugikan, sehingga investor akan lebih dapat dilindungi.

Telaah Pustaka

Teori Agensi

Teori agensi menjadi *grand theory* dalam penelitian ini. Teori ini diutarakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori agensi memandang praktik tata kelola perusahaan dengan sudut pandang konflik/dilema agensi. Teori ini menganggap bahwa hubungan tata kelola perusahaan sebagai hubungan antara pemegang saham (*principal*), dan manajer atau direksi (agen). Masalah agensi yang paling sering dihadapi adalah tentang asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Manajer dianggap sangat mengetahui hal-hal yang terjadi di perusahaan sedangkan pemegang saham harus bergantung pada informasi yang diberikan oleh para manajer. Informasi yang diberikan kepada para pemegang saham adalah berupa laporan keuangan. Manajer yang memiliki sifat yang oportunistik atau bersifat sebagai *utility maximize* akan cenderung memanipulasi laporan keuangan guna memperoleh kinerja yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Salah satu metode yang bisa diupayakan untuk mengurangi konflik agensi dalam perusahaan adalah melalui penggunaan sistem pengendalian dari prinsipal yang memadai. Tata kelola perusahaan menjadi salah satu sistem pengendalian yang mumpuni agar dapat mengurangi sifat manajer yang oportunistik seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut teori agensi, dewan direksi yang menjalankan tata kelola perusahaan akan memiliki kekuasaan yang sah untuk merekrut, memutuskan hubungan karyawan dan memberikan imbalan kepada manajemen, dan juga mempunyai peran penting dalam penjagaan investasi modal (Baysinger dan Hoskisson, 1990).

Pada konteks dewan direksi ataupun dewan komisaris sebagai salah satu bagian dari sistem pengendalian, saat anggota dewan direksi maupun komisaris memiliki koneksi politik maka akan memiliki kepentingan lain. Kepentingan lain tersebut yang akan menimbulkan konflik yang dapat menyebabkan mereka memutuskan tanggung jawab mana yang dipilih untuk diprioritaskan. Ketika dewan komisaris memutuskan untuk lebih mendahulukan perjanjian politiknya, maka pengawasan pada perusahaan akan berkurang dan dapat semakin menyebabkan terjadinya peningkatan praktik manajemen laba (Darmayanti et al., 2021).

Manajemen Laba Riil

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai sesuatu keadaan dimana manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dengan tujuan untuk membuat para *stakeholder* memiliki asumsi yang kurang tepat tentang kinerja perusahaan, terutama dari sisi ekonomi atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy dan Wahlen, 1999). Praktik manajemen laba bukan hal yang selalu merugikan perusahaan karena beberapa metode yang digunakan untuk situasi tertentu terbukti dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kinerja bagi perusahaan. Sebaliknya, manajemen laba akan berdampak negatif terhadap perusahaan jika dilakukan atas dasar oportuniste manajerial.

Manajemen laba riil atau *real earnings management* atau *real activities manipulation* adalah perubahan dari praktik operasi normal, yang dimotivasi oleh keinginan manajer untuk menyampaikan informasi yang kurang tepat agar pemangku kepentingan yakin bahwa tujuan pelaporan keuangan sudah tercapai (Roychowdhury, 2006). Beberapa metode manipulasi aktivitas riil, seperti diskon dan pengurangan biaya diskresioner, dimungkinkan untuk terjadi pada aktivitas normal perusahaan pada situasi ekonomi tertentu. Akan tetapi, jika manajer melakukan hal ini dengan lebih ekstensif daripada keadaan normal, dengan tujuan untuk mencapai target tertentu maka bisa dikatakan bahwa manajer tersebut telah melakukan manajemen laba riil.

Menurut Roychowdhury (2006), terdapat tiga metode manipulasi kegiatan riil yang dapat dilakukan perusahaan. Ketiga hal tersebut adalah: (a) manipulasi penjualan, yaitu dengan mempercepat waktu pengakuan penjualan dan/atau dengan sengaja menaikkan penjualan melalui peningkatan diskon atau termin kredit yang lebih longgar, (b) pengurangan pembiayaan atau biaya yang bersifat diskresioner, dan (c) *overproduction*, atau menaikkan jumlah produksi untuk melaporkan nilai harga pokok penjualan yang lebih kecil.

Pengembangan Hipotesis

Menurut pandangan teori agensi, perusahaan yang mempunyai koneksi politik mempunyai risiko tinggi dan mempunyai kemungkinan kegagalan bisnis yang lebih tinggi (Supatmi dan Handayani, 2022). Agar dapat mengurangi risiko yang tinggi, manajemen laba diputuskan untuk dilakukan agar dapat memperlihatkan bahwa perusahaan telah mencapai kinerja yang baik (Chaney et al., 2011). Jika perusahaan mempunyai koneksi politik, terdapat kecenderungan lebih dari perusahaan tersebut untuk mengimplementasikan praktik manajemen laba (Braam et al., 2015). Hal ini dilakukan agar reputasi perusahaan tetap terjaga dan tidak kehilangan *privilege* dari koneksi tersebut (Savitri, 2021).

Dalam konteks tata kelola, Indonesia menganut sistem *two-tiered board*. Dalam konteks ini perusahaan di Indonesia memiliki dua dewan yang terdiri dewan manajemen/direksi dan dewan pengawas/komisaris. Dewan manajemen/direksi terdiri dari direktur eksekutif dan dewan pengawas/komisaris terdiri orang-orang

yang berasal dari luar perusahaan. Dan dalam hal ini dewan komisaris adalah dewan yang memiliki fungsi *monitoring* dan pengendalian ke dewan direksi atas nama seluruh pemegang saham (Dobija dan Puławska, 2022; Gołębiowska dan Urbanek, 2016).

Darmayanti et al. (2021) menyatakan bahwa dewan direksi memiliki peran penting bagi perusahaan dikarenakan otoritas yang dimiliki dapat menentukan arah dan tujuan perusahaan. Selain itu, dewan direksi terpilih juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Didorong kepentingan-kepentingan tersebut, maka dewan direksi yang dipilih akan berasal dari berbagai kalangan termasuk yang terkoneksi politik. Menurut Darmayanti et al. (2021), dewan direksi perusahaan dapat mendorong terjadinya peningkatan praktik manajemen laba, mempunyai kinerja yang buruk, serta memiliki kualitas laba yang rendah. Dewan direksi yang terkoneksi politik akan mempengaruhi kinerja dan aktivitas perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan terkait praktik-praktik akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Braam et al. (2015) menemukan bahwa dewan direksi terkoneksi politik akan melakukan manajemen laba untuk lebih mengejar pencapaian target, menjaga nama baik dan koneksi politik yang ada, sehingga kepentingan politiknya dapat terdukung.

Darmayanti et al. (2021) mengungkapkan bahwa ketika dewan komisaris terkoneksi politik atau memiliki kontrak politis dengan institusi lain, maka kemungkinan terjadinya konflik kepentingan meningkat, yang akhirnya akan memerlukan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam memilih tanggung jawab mana yang harus diprioritaskan. Saat yang dipilih adalah untuk memprioritaskan tanggung jawab politiknya, maka *monitoring* akan semakin melemah. Rendahnya tingkat pengawasan ini dapat memicu rendahnya kualitas laba atau peningkatan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa koneksi politik, dalam hal ini diukur menggunakan dewan direksi dan dewan komisaris dengan keterkaitan politik dapat mempunyai pengaruh terhadap praktik *earnings management* di perusahaan. Savitri (2021) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan manajemen laba untuk mempertahankan reputasi. Penelitian Darmayanti et al. (2021) juga menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif antara *board of directors* terhadap praktik manajemen laba. Selain itu penelitian Supatmi dan Handayani (2022) juga menemukan adanya hubungan antara dewan komisaris terkoneksi politik dengan manajemen laba riil. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H₁: Dewan direksi terkoneksi politik berpengaruh terhadap manajemen laba riil

H₂: Dewan komisaris terkoneksi politik berpengaruh terhadap manajemen laba riil

Metoda

Data dan Sampel

Data-data pada penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Data penelitian ini menggunakan *annual report* perusahaan publik. Periode sampel penelitian ini adalah tahun 2018-2020.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel adalah : (1) Perusahaan manufaktur sektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI (IDX) pada periode penelitian, yaitu tahun 2018-2020. Pemilihan sub-sektor *food and beverages* ini berkaitan dengan fenomena yang telah dinyatakan sebelumnya; dan (2) Perusahaan manufaktur sektor *food and beverages* yang tidak *delisting* pada periode penelitian yaitu tahun 2018-2020

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Manajemen laba riil merupakan variabel dependen pada penelitian ini. Cohen et al. (2008) dan Roychowdhury (2006) memberikan beberapa pengukuran untuk manajemen laba riil, yang pertama adalah pengukuran untuk *abnormal cash flow from operation*. *Abnormal cash flow from operation* didapatkan dari arus kas operasi aktual dikurangi dengan arus kas normal yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CFO_{it} / A_{it-1} = \alpha_0 (1 / A_{it-1}) + \alpha_1 (S_t / A_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta S_t / TA_{t-1}) + \varepsilon_t \quad (1)$$

A_t adalah total aset pada akhir periode t dan S_t adalah penjualan pada periode t , sedangkan ΔS_t adalah pengurangan penjualan periode ini (S_t) dengan penjualan periode sebelumnya (S_{t-1}). Cohen et al. (2008) juga telah merumuskan cara untuk menghitung biaya produksi normal. Penelitian ini akan mengikuti rumus tersebut. Rumus untuk menghitung biaya produksi normal adalah:

$$PROD_t / A_{t-1} = \alpha_0 (1 / TA_{it-1}) + \alpha_1 (S_t / A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta S_t / A_{it-1}) + \alpha_3 (\Delta S_{t-1} / A_{it-1}) + \varepsilon_t \quad (2)$$

Dimana PROD adalah total harga pokok penjualan dan pertumbuhan persediaan. Dengan menyederhanakan beberapa asumsi dari Dechow et al. (1995) bahwa biaya-biaya diskresioner seharusnya diestimasi dengan persamaan linear dari *contemporaneous sales*. Dan untuk mengatasi masalah bila manajer melakukan peningkatan penjualan untuk meningkatkan laba yang dilaporkan maka *discretionary expenses* atau biaya diskresioner disini diukur menggunakan penjualan tahun sebelumnya. Cohen et al. (2008) juga telah merumuskan cara mengestimasi *normal discretionary expenses* yaitu:

$$DISEXP_t / A_{t-1} = \alpha_0 (1 / A_{t-1}) + \alpha_1 (S_{t-1} / A_{t-1}) + \varepsilon_t \quad (3)$$

Berdasarkan penelitian Cohen et al. (2008), akan digunakan sebuah pengukuran komprehensif dari manajemen laba riil dengan menggabungkan tiga pengukuran individual tersebut yaitu menggunakan REM_Index. REM_Index ini adalah jumlah dari komponen individual yang sudah distandarisasi. Rumus REM_Index adalah minus *standardized Abn_CFO + standardized Abn_Prod – standardized Abn_Discexp*.

Variabel Independen

Koneksi Politik

Variabel bebas atau independen pada penelitian ini adalah koneksi politik. Pengukuran koneksi politik menggunakan ukuran jumlah dewan, baik dewan komisaris (DK) maupun dewan direksi (DD), yang memiliki keterkaitan politik. Pengukuran diadopsi dari penelitian Supatmi dan Handayani (2022). Penentuan kriteria dari dewan terkoneksi politik menggunakan acuan dari penelitian yang dilakukan oleh Supatmi dan Handayani (2022) yang mengacu pada Ding et al. (2018), Faccio (2006), dan Habib et al. (2017), yaitu dewan perusahaan yang pada saat dilaporkan juga berfungsi sebagai kepala negara atau mantan kepala negara, pimpinan/anggota parlemen, militer, pejabat kementerian, lembaga pemerintahan lainnya, pimpinan pemerintah daerah, atau memiliki keterkaitan dekat (keluarga) maupun hubungan sahabat dengan politisi atau partai. Selain itu, hasil penelitian terdahulu digunakan juga sebagai acuan apabila diketahui seseorang atau perusahaan terkoneksi politik.

Variabel Kontrol

Definisi variabel kontrol yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ukuran perusahaan (Size)

Ukuran perusahaan akan dihitung dengan menggunakan total aset yang dimiliki dengan rumus: *Size = log (nilai buku total aset)*

Return on Assets (ROA)

Return on Asset (ROA) dapat didefinisikan sebagai rasio yang menggambarkan *return* atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. ROA menghitung efisiensi dan penggunaan sumber daya dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Semakin rendah ROA suatu perusahaan, maka akan semakin meningkat motivasi manajer untuk memanipulasi laporan keuangan. Rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah:

$$ROA = \frac{\textit{Earning After Interest and Tax}}{\textit{Total Asset}}$$

Leverage

Leverage adalah risiko yang dilihat melalui rasio utang terhadap aset. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{total liabilities}}{\text{total assets}}$$

Model Penelitian

$$\text{REM} = a + b_1\text{DK_Politics} + b_2\text{DD_Politics} + b_3\text{FIRMSIZE} + b_4\text{LEV} + b_5\text{ROA} + \varepsilon$$

Dimana:

REM = *Real Earnings Management* terdiri dari tiga pengukuran yaitu *abnormal cash flow from operation*, *abnormal discretionary expenses*, dan *abnormal production cost*. Pengukuran ini akan dibentuk menjadi sebuah indeks yang disebut REM_Index ($-\text{standardized Abn_CFO} + \text{standardized Abn_Prod} - \text{standardized Abn_Discexp}$).

DK_Politics= Jumlah dewan komisaris yang terkoneksi politik

DD_Politics= Jumlah dewan direksi yang terkoneksi politik

FIRMSIZE= Ukuran perusahaan, yang diukur menggunakan log natural total aset

LEV= *Leverage* perusahaan, yang diukur menggunakan rasio total hutang dibagi total aset

ROA= *Return on Asset Ratio*

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian dijelaskan dalam tabel dan uraian di bawah ini.

Data Penelitian

Tabel 1. Data Penelitian

Keterangan	Jumlah (<i>firm years</i>)
Data (observasi) penelitian awal	300
Dikurangi: Data yang tidak lengkap	(3)
Data (observasi) akhir	297

Data awal yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebanyak 300 *firm years*. Data ini diperoleh dari BEI yang terdiri atas perusahaan manufaktur yang terdaftar. Data tidak lengkap dikeluarkan dari observasi. Sehingga data akhir adalah sebanyak 297 *firm years*.

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
0,088	0,000	Tidak Berdistribusi Normal

Berdasarkan uji *1-sample Kolmogorov-Smirnov* didapatkan hasil signifikansi untuk normalitas residual adalah sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada penelitian ini tidak terdistribusi normal. Oleh karena itu, akan terdapat keterbatasan dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson</i>	Keterangan
0,784	Terdapat autokorelasi positif

Hasil pengujian autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* menunjukkan hasil sebesar 0,784. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif dalam data penelitian ini. Oleh karena itu, ada keterbatasan dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Keterangan
Dewan Direksi Terkoneksi Politik (DD_Politik)	1,221	Tidak terjadi multikolinearitas
Dewan Komisaris Terkoneksi Politik (DK_Politik)	1,223	Tidak terjadi multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan hasil *variance inflation factor* variabel dewan komisaris dan dewan direksi terkoneksi politik adalah sebesar 1,223 dan 1,221. Nilai ini kurang dari 10, sehingga disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Dewan Direksi Terkoneksi Politik (DD_Politik)	0,507	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dewan Komisaris Terkoneksi Politik (DK_Politik)	0,204	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji glejser didapatkan hasil bahwa signifikansi masing-masing variabel kurang dari 0,05. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil ini adalah bahwa model penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	T-hitung	Signifikansi	Keterangan
Dewan Direksi Terkoneksi Politik (DD_Politik)	-0,461	0,645	H1 tidak terdukung
Dewan Komisaris Terkoneksi Politik (DK_Politik)	-1,458	0,138	H2 tidak terdukung

Berdasarkan uji regresi berganda, didapatkan hasil bahwa nilai t-hitung dari variabel dewan direksi dan dewan komisaris terkoneksi politik lebih kecil daripada t tabel, yaitu masing-masing sebesar -0,461 dan -1,458. Selain itu nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen juga lebih dari 0,05 yaitu 0,645 dan 0,138. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan direksi dan dewan komisaris terkoneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba riil. Oleh karena itu, H1 dan H2 penelitian ini tidak terdukung.

Pembahasan

Penelitian ini meneliti hubungan antara manajemen laba riil dan koneksi politik pada perusahaan publik di Indonesia. Hipotesis penelitian yang ingin diuji adalah terdapat pengaruh koneksi politik terhadap tingkat manajemen laba riil di Indonesia. Variabel koneksi politik dalam penelitian ini diprosikan oleh dewan komisaris dan dewan direksi terkoneksi politik. Sedangkan manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba riil.

Dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan hasil yang menunjukkan tidak terdapatnya pengaruh antara dewan komisaris dan dewan direksi terkoneksi politik terhadap tingkat manajemen laba riil. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Savitri (2021) dan Rahmaningtyas et al. (2021), yang menemukan bahwa koneksi politik dapat meningkatkan intensitas manajemen laba perusahaan. Supatmi dan Handayani (2022) juga menemukan bahwa dewan komisaris yang mempunyai keterkaitan politik mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.

Koneksi politik dalam perusahaan selama ini dikaitkan dengan dihasilkannya kualitas laba yang lebih rendah dikarenakan perusahaan yang dewan direksinya mempunyai keterkaitan politik akan lebih sering mempraktikkan manajemen laba dengan berbagai tujuan. Penelitian yang dilakukan oleh Chaney et al. (2011) berhasil membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki keterkaitan politik akan melakukan praktik manajemen laba dengan tujuan untuk meminimalisir tekanan pasar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jacoby et al. (2019) membuktikan jika salah satu tujuan perusahaan terkoneksi politik di Cina akan melakukan praktik manajemen laba saat memiliki kinerja buruk, hal ini dilakukan supaya bantuan dari pemerintah tetap diterima. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Braam et al. (2015) juga membuktikan bahwa manajemen laba dilakukan oleh perusahaan terkoneksi politik untuk mempertahankan reputasi dan keterkaitan politik yang sudah ada selama ini sehingga dapat mendukung kepentingan politiknya.

Hasil penelitian ini justru menemukan bahwa dewan direksi dan dewan komisaris terkoneksi politik tidak berpengaruh pada tingkat manajemen laba riil. Hal ini mengindikasikan bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh dewan direksi sebagai pemegang fungsi eksekutif dan dewan komisaris sebagai pemegang fungsi pengawasan belum bisa menjadi prediktor tentang tingkat manajemen laba riil perusahaan. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Attia et al. (2016) yang membuktikan bahwa perusahaan dengan koneksi politik tidak langsung mempunyai hubungan dengan praktik manajemen laba. Supatmi dan

Handayani (2022) juga menemukan bahwa dewan direksi terkoneksi politik tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada industri keuangan. Hal ini dapat terjadi karena koneksi politik hanya sebagai perlindungan politik saja tanpa ada intervensi ke perusahaan (Supatmi dan Handayani, 2022). Selain itu, pada sampel yang didapatkan masih sedikit sampel yang memiliki dewan komisaris ataupun direksi yang terkoneksi politik, yaitu sekitar 27% dari total sampel untuk dewan komisaris dan kurang lebih 1% dari total sampel untuk dewan direksi. Rendahnya jumlah dewan direksi maupun dewan komisaris yang mempunyai koneksi politik memberikan dampak dalam pengambilan keputusan manajerial dan pengawasan, yaitu peran yang tidak signifikan sehingga belum bisa menjadi prediktor bagi terjadinya manajemen laba itu sendiri.

Simpulan

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa dewan komisaris dan dewan direksi yang terkoneksi politik tidak berpengaruh terhadap tingkat manajemen laba riil. Koneksi politik dalam perusahaan selama ini dikaitkan dengan dihasilkannya kualitas laba yang lebih rendah dikarenakan perusahaan dengan koneksi politik akan lebih sering melakukan praktik manajemen laba dengan berbagai sasaran tetapi hal ini tidak dapat didukung di dalam penelitian ini. Hal ini bisa disebabkan oleh peran yang tidak signifikan dari dewan komisaris dan direksi terkoneksi politik tersebut sehingga belum bisa menjadi prediktor bagi terjadinya manajemen laba itu sendiri.

Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini yaitu penulis hanya menggunakan proksi koneksi politik tanpa mempertimbangkan tingkat jabatan saat menjadi anggota politik. Selain itu, penelitian ini mengalami beberapa masalah dalam uji asumsi klasik yaitu normalitas dan autokorelasi sehingga perlu kehati-hatian dalam menarik simpulan.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan memperhatikan tingkat jabatan dari dewan direksi atau komisaris dalam anggota politiknya, dan juga penelitian selanjutnya dapat menambah *additional analysis* untuk memisahkan sampel-sampel menjadi sebelum pandemi Covid-19 dan sesudahnya. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan ukuran dewan sebagai variabel kontrol.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, E. A., Jamaludin, M. F., Agustia, D., & Harymawan, I. (2020). Director Networks, Political Connections, and Earnings Quality in Malaysia. *Management and Organization Review*, 16(3), 687–724. <https://doi.org/10.1017/mor.2020.26>
- Attia, M. B. R., Lassoued, N., & Attia, A. (2016). Political costs and earnings management : evidence from Tunisia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 6, 388–407.

- Baysinger, B., & Hoskisson, R. E. (1990). The Composition of Boards of Directors and Strategic Control: Effects on Corporate Strategy. *Academy of Management Review*, 15(1), 72–87.
- Braam, G., Nandy, M., Weitzel, U., & Lodh, S. (2015). Accrual-based and real earnings management and political connections. *The International Journal of Accounting*, 50(2), 111–141. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2013.10.009>
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 1–2(58–76).
- Cohen, D. A., Dey, A., & Lys, T. Z. (2008). Real and Accrual-Based Earnings Management in the Pre- and Post-Sarbanes-Oxley Periods. *The Accounting Review*, 83(3), 757–787.
- Darmayanti, Y., Rifa, D., & Khairia, I. (2021). Pengaruh corporate governance terhadap hubungan keterlibatan dewan di bidang politik dan manajemen laba. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 138–151.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70(2), 193–225.
- Ding, R., Li, J., & Wu, Z. (2018). Government affiliation, real earnings management, and firm performance: The case of privately held firms. *Journal of Business Research*, 83, 138–150.
- Dobija, D., & Puławska, K. (2022). The influence of board members with foreign experience on the timely delivery of financial reports. *Journal of Management and Governance*, 26(1), 287–313.
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386.
- Gołębiowska, S. A., & Urbanek, P. (2016). Corporate boards, large blockholders and executive compensation in banks: Evidence from Poland. *Emerging Markets Review*, Elsevier, 28(C), 203–220.
- Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political Connections, Related Party Transactions, and Auditor Choice: Evidence from Indonesia. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 13(1), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.004>
- Healy, P. M., & J.M., W. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and Its Implication for Standard Setting. *Accounting Horizon*, 13, 365–383.
- Jacoby, G., Li, J., & Liu, M. (2019). Financial distress, political affiliation and earnings management: the case of politically affiliated private firms. *The European Journal of Finance*, 25(6), 508–523.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Krisnawati, R., Fionasari, D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 84–92.
- Preuss, S., & Königsgruber, R. (2021). How do corporate political connections influence financial reporting? A synthesis of the literature. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(1), 106802. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106802>
- Puspitasari, A., & Nugrahanti, Y. . (2016). Pengaruh hubungan politik, ukuran KAP, dan audit tenure terhadap manajemen laba riil. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(1), 27–43.
- Rahmaningtyas, D. H., Permana, D., Setianingtyas, & Widagdo, A. K. (2021). Political Connection And Earnings Management: Evidence From Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 5(2).
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation.

Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335–370.
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002>

Sari, I. F. (n.d.). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Keuangan Dan Keputusan Pembiayaan Perusahaan. Doctoral Dissertation, STIE Perbanas Surabaya.

Savitri, E. (2021). Political Connection, Family Ownership, and Earnings Management in Manufacturing Companies in Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 19(3), 585–593.
<https://doi.org/10.21776/ub.jam.2021.019.03.11>

Supatmi, S., & Handayani, L. (2022). Koneksi Politik Dan Praktik Manajemen Laba Riil: Studi Pada Industri Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(1), 121–134.
<https://doi.org/10.22219/jaa.v5i1.19507>

Tee, C. M. (2018). Political connections and the cost of debt: Re-examining the evidence from Malaysia. *Journal of Multinational Financial Management*, 46, 51–62.
<https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2018.05.003>

URL: <https://ejournal.uksw.edu/persi/article/view/6923>

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing the URL <https://ejournal.uksw.edu/persi/article/view/6923>. The page content includes:

- Breadcrumbs:** Home / Archives / Vol 6 No 1 (2023) / Articles
- Title:** Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tingkat Real Earnings Management di Indonesia
- Authors:**
 - Febby Astrid Kesaulya** (Universitas Katolik Musi Charitas)
 - Weny Putri** (Universitas Katolik Musi Charitas)
 - Khairunnisa Khairunnisa** (Universitas Katolik Musi Charitas)
- DOI:** <https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p1-14>
- Keywords:** Politically Connected Board of Commissioner, Politically Connected Board of Director, Political Connections, Real Earnings Management
- Abstract:** *The Objective of this research was to prove that there is a correlation between political connections with real earnings management. Some of the previous research had shown*
- Journal Cover:** PERSPEKTIF AKUNTANSI, Volume 6 / Nomor 1, S.S.N. : 2623-0154(Print), 2623-0186(Online)
- Navigation:** PDF (Bahasa Indonesia)
- Right Sidebar:** Editorial Team, Focus and Scope, Author Guidelines, Publication Ethics, Contact, Make a Submission, Article Template, Tools, MENDELEY, turnitin

The Windows taskbar at the bottom shows the time as 2:55 PM on 3/12/2023.